

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Surabaya Timur dalam menangani proses penagihan kepada pihak yang bersngkutan khususnya dibagian penagihan kepada masyarakat khususnya Surabaya Timur. Bagian penagihan yang dalam menjalankan dinas luar untuk memberitahukan surat tagihan pajak kendaraan bermotor kepada Wajib Pajak yang harus diselesaikan sebelum muncul surat tagihan berikutnya. Dari hasil penelitian di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Surabaya Timur adalah mengenai proses penagihan kendaraan bermotor sebagai berikut:

1. Penagihan yang dilakukan pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Surabaya Timur dengan cara memberikan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Peringatan, Surat Paksa.
2. Dokumen yang terkait dengan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Peringatan, Surat Paksa.
3. Fungsi yang terkait adalah fungsi pendataan untuk menangani data-data Wajib Pajak, fungsi penagihan untuk menangani masalah penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor, dan fungsi pembayaran untuk menangani kebutuhan Wajib Pajak terkait dengan pembayaran kewajiban pajaknya.

4. Secara umum dalam proses penagihan setelah empat belas hari dari penerbitan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor ditambah satu hari masa pajak maka Unit Pelaksana Teknis akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah. Setelah tiga puluh hari penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah langkah selanjutnya akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah, setelah empat belas hari penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah langkah selanjutnya yang akan diterbitkan Surat Peringatan pertama, setelah dua puluh satu hari penerbitan Surat Peringatan pertama langkah selanjutnya akan diterbitkan Surat Peringatan kedua dan langkah terakhir akan diterbitkan surat paksa.
5. Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak daerah, Surat Kepatuhan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan.

5.2. Saran

Dari hasil kegiatan penelitian mengenai proses penagihan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Surabaya Timur yang telah dilakukan, berikut saran yang diharapkan mampu memberi manfaat di masa

mendatang bagi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya sosialisasi yang diadakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan sebelum terjadinya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.
2. Sebaiknya Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Surabaya Timur memberikan penjelasan terhadap Wajib Pajak yang telat bayar karena sudah jatuh temponya Pajak Kendaraan Bermotor untuk dibayar dan berapa jumlah yang harus dibayar keseluruhan. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Surabaya Timur juga harus memberikan surat terhadap para Wajib Pajak yang telat bayar, setelah surat pemberitahuan pajak tahunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2001. *Perpajakan*. Edisi revisi 2011. Yogyakarta: Andi
- Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas. *Penagihan Pajak di Indonesia*. 2006. Malang: Bayumedia Publishing
- Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2000. *Tentang Penagihan Pajak. Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia*.
- Perundang-Undang pasal 1 ayat 9. 2010. Tentang Pajak Daerah. *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010*. Surabaya. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
- Rochmat Soemitro. 2003. *Pajak dan Pembangunan*. Bandung: Eresco
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2003. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat